**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Selain sektor pertanian, kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ketahun menunjukkan kontribusi yang signifikan.Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap Pendapatan Nasional. Selain itu untuk wilayah tertentu, baik kabupaten, atau provinsi dapat juga dilakukan dengan melihat besaran investasi yang dikeluarkan ke sektor tersebut dan melihat pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor Industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor Industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor Industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain yang ditunjukkan dengan nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation)* dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Pada negara-negara berkembang, peranan sektor Industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor Industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor Industri.

Indonesia, sejak awalpembangunan dimulai,kontribusi sektor Industrinya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan sektor Industri di Indonesia ditandai dengan perubahan struktur perekonomian pada kota-kota besar. Pergerakan sektor Industri yang demikian cepat di kota-kota besar di Indonesia telah membawa Indonesia pada pencapaian lajuIndustri manufaktur berperan besar dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja produktif dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga Tahun 2012 di antara sembilan sektor produksi, industri manufaktur adalah penyumbang terbesar (25%) dalam produk domestik bruto (PDB), selain itu juga menyerap 13% tenaga kerja secara nasional. Peningkatan produktivitas industri manufaktur akan berdampak besar pada perekonomian.

Hampir semua negara maju mencapai tingkat kematangan perekonomiannya karena pertumbuhan industri yang pesat. Beberapa negara memang dapat menjadi kaya karena pertumbuhan sektor jasa atau kepemilikan sumber daya alam. Namun kekecualian tersebut hanya terjadi pada negara kecil seperti Singapore, Brunei dan negara-negara di Timur Tengah.  Tanpa didukung industri manufaktur yang kuat, negara dengan penduduk besar seperti Indonesia nampaknya akan sulit mencapai kemajuan.

Berbagai alasan mengapa industri manufaktur perlu didorong pertumbuhannya. Dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor jasa, industri manufaktur lebih banyak menyerap tenaga kerja formal terlatih. Skala usaha dan teknologi industri manufaktur dengan relatif mudah diperluas dan ditingkatkan. Hal itu memungkinkan produktivitas dan upah pekerja di sektor industri dapat meningkat lebih cepat sehingga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tentu saja, industri manufaktur tidak hanya sekedar berkembang di dalam negeri, tetapi juga harus produktif dan berdaya saing. Industri manufaktur yang efisien adalah kunci keberhasilan peningkatan nilai tambah produk primer. Pengolahan hasil pertanian dan pertambangan akan bermanfaat optimal bagi penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja jika dilakukan oleh industri yang berdaya saing.

Tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah kecenderungan penurunan daya saing industri di pasar internasional. Penyebabnya antara lain adalah meningkatnya biaya energi, ekonomi biaya tinggi serta belum memadainya layanan birokrasi. Selain adanya kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil menengah, belum terbangunnya struktur klaster industri (i*ndustrial cluster*) yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi tertentu.

Pembangunan industri nasional harus dilakukan secara holistik, sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, energi sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, pendidikan, riset, perdagangan, termasuk melakukan investasi di sektor industri. Oleh karenanya dukungan dan partisipasi seluruh pihak terkait sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor industri nasional. Pembangunan industri yang sinergi dengan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan: Pertama, pendekatan *top down* yaitu pembangunan industri yang direncanakan (*by design*) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kebijakan industri nasional dilakukan dengan menentukan industri prioritas (32 industri prioritas, dengan pendekatan klaster). Kedua, pendekatan bottom up yaitu melalui penetapan kompetensi inti industri yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing.

Kompetensi inti adalah sebagai kumpulan keterampilan dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi dapat menyediakan menfaat tersendiri dari pelanggannya. Dengan demikian, kompetensi inti merupakan sekumpulan sumber daya dan kemampuan organisasi yang memiliki keunikan tinggi yang diperlukan untuk mencapai tujuan­tujuan organisasi. Keunikan yang dimiliki organisasi dapat membuat kesulitan bagi pesaing untuk menirunya.

Pengembangan kompetensi inti industri daerah tidak terlepas dari kerangka pembangunan daerah. Sehingga, tujuan pengembangan kompetensi inti industri dalam hal ini berupa peningkatan daya saing daerah sejalan dengan tujuan pembangunan daerah itu sendiri, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun daya saing daerah diperlukan penciptaan kompetensi inti industri bagi daerah tersebut. Hal ini diperlukan agar seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti industri.

Dilihat dari dimensi yang lebih luas, yaitu suatu daerah (Kabupaten/Kota), pemilihan kompetensi inti industrinya tidak boleh keluar dari kriteria-kriteria seperti memiliki nilai tambah yang tinggi, memiliki keunikan daerah, memiliki keterkaitan yang kuat, serta memiliki peluang untuk menembus pasar internasional. Dengan kata lain, penentuan kompetensi inti industri suatu daerah haruslah memberikan dampak yang besar dalam menstimulus perekonomian daerah.

Kebijakan pengembangan industri nasional telah diamatkan pada Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008. Dalam Pasal 3 tercantum bahwa “Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/ kota, serta Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di budang perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan telah ditetapkan strategi operasional dengan pendekatan Perencanaan Pembangunan Industri dilakukan dari 2 (dua) arah yaitu : pertama, pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan (*by-design*) dengan memperhatikan kriteria yang tentukan secara nasional yaitu 32 industri prioritas dengan pendekatan klaster, kedua, melalui pendekatan perencanaan secara bottom-up yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang berlandaskan pada potensi yang dimiliki daerah dan merupakan keunggulan daerah sehingga daerah memiliki daya saing. Pada pendekatan ini Kementerian Perindustrian dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan dan membangun kompetensi inti industri tersebut dengan bekerjasama secara erat dengan daerah.

Selain itu kebijakan pengembangan industri nasional telah diamanatkan pula pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035.

Sasaran pembangunan industri daerah antara lain adalah meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, memenfaatkan sumberdaya alam (SDA) secara optimal dan melakukan kerjasama antar daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan danya rencana pengembangan kompetensi inti industri tersinergi mulai dari pusat dan daerah sehingga menjadi semakin fokus. Bertitik tolak pada hal tersebut di atas dalam melaksanakan kebijakan tersebut, khususnya berkaitan dengan pembangunan industri di daerah,

Oleh karena itu melalui pendekatan *bottom up,* penciptaan nilai tambah ekonomi di daerah dapat dilakukan melalui strategi pengembangan kompetensi industri daerah. Penerapan strategi ini akan mengakselerasi pembangunan di semua daerah sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penyebab ketertinggalan daerah yang terjadi di kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut, umumnya secara geografis daerah kabupaten Kepulauan Sula merupakan wilayah kepulauan dengan jarak antar pulau yang berjauhan dan terpisah oleh lautan yang cukup luas, sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari masyarakat menggunakan transportasi laut dan merupakan transportasi utama yang melayani pergerakan antar pulau. Transportasi laut yang sering digunakan oleh masyarakat adalah motor temple (long boat) dengan kapasitas muatan 1 – 2 ton. Kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat kabupaten Kepulauan Sula yaitu kondisi musim, dimana terdapat dua musim yang saling bergantian dalam satu tahun, yaitu musim Timur dan musim Barat. Pada bulan April – September berhembus anghin selatan yang diserati dengan ombak yasng cukup tinggi, sehiungga masyarakat sulit untuk melakukan aktivitasnya karena satu-satunya transportasi yang digunakan adalah transportasi laut. Dengan belum terbukanya akses sarana transportasi darat inilah yang membuat masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 12 wilayah kecamatan dan satu kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 39 tahun 2015 luas daratan Kabupaten Kepulauan Sula yaitu 3.304,32 km2

Tabel I.1 Jarak dari ibu kota kabupaten ke kota kecamatan di kabupaten Kepulauan Sula (km), 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kecamatan**  ***Subdistrict*** | **Ibukota Kecamatan**  ***Capital of Subdistrict*** | **Jarak ke Ibukota Kabupaten**  ***Distance to Regency Capital*** |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Sulabesi Barat | Kabau Darat | 47 |
| 2 | Sulabesi Selatan | Fuata | 73 |
| 3 | Sanana | Waihama | 0 |
| 4 | Sulabesi Tengah | Waiboga | 15 |
| 5 | Sulabesi Timur | Baleha | 40 |
| 6 | Sanana Utara | Pohea | 13 |
| 7 | Mangoli Timur | Waitina | 21 |
| 8 | Mangoli Tengah | Mangoli | 18 |
| 9 | Mangoli Utara Timur | Waisakai | 36 |
| 10 | Mangoli Barat | Dofa | 95 |
| 11 | Mangoli Utara | Falabisahaya | 118 |
| 12 | Mangoli Selatan | Buya | 53 |

Sumber : BAPPEDA kabupaten Kepulauan Sula

Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula bagian utara berbatasan dengan Laut Maluku, bagian timur berbatasan dengan Laut Seram, bagian selatan berbatasan dengan Laut Banda dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Taliabu.

Gaambar I.1 Peta kabupaten Kepulauan Sula



Sumber : BPS kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Namun sampai dengan saat ini belum dapat dikelola secara optimal karena selain teknologi yang belum mendukung, juga sarana penunjang ekonomi belum memadai sehingga masyarakat masih berpikir untuk bagaimana memanfatakan sumber daya alam yang tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Karena pasar sebagai transaksi jual beli belum cukup tersedia. Potensi sumber daya alam yang lain, seperti perikanan dan pertambangan masih dalam upaya untuk digarap dengan mendatangkan berbagai investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel I.2 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di kabupaten Kepulauan Sula (Hektar), 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kecamatan**  ***Subdistrict*** | **Karet**  ***Rubber*** | **Kelapa**  ***Coconut*** | **Kelapa**  **Sawit *Oil Palm*** | **Kopi**  ***Coffee*** | **Lada**  ***Pepper*** | **Kakao**  ***Cocoa*** | **Lainnya**  ***Others*** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Sulabesi Barat | … | 865 | … | … | … | 572 | 932 |
| 2 | Sulabesi Selatan | … | 965 | … | … | … | 660 | 781 |
| 3 | Sanana | … | 390 | … | … | … | 351 | 1 156 |
| 4 | Sulabesi Tengah | … | 339 | … | … | … | 437 | 808 |
| 5 | Sulabesi Timur | … | 437 | … | … | … | 636 | 851 |
| 6 | Sanana Utara | … | 125 | … | … | … | 140 | 676 |
| 7 | Mangoli Timur | … | 4 335 | … | … | … | 1 000 | 775 |
| 8 | Mangoli Tengah | … | 4 251 | … | … | … | 1 053 | 729 |
| 9 | Mangoli Utara Timur | … | 4 530 | … | … | … | 976 | 629 |
| 10 | Mangoli Barat | … | 4 450 | … | … | … | 149 | 471 |
| 11 | Mangoli Utara | … | 5 036 | … | … | … | 87 | 453 |
| 12 | Mangoli Selatan | … | 4 873 | … | … | … | 922 | 521 |
| **K** | **epulauan Sula** | … | **30 596** | … | … | … | **6983** | **8 782** |

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Kepulauan Sula

Tabel I*.*3 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di kabupaten Kepulauan Sula (Ton), 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kecamatan**  ***Subdistrict*** | **Karet**  ***Rubber*** | **Kelapa**  ***Coconut*** | **Kelapa**  **Sawit *Oil Palm*** | **Kopi**  ***Coffee*** | **Lada**  ***Pepper*** | **Kakao**  ***Cocoa*** | **Lainnya**  ***Others*** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Sulabesi Barat | … | 791 | … | … | … | 262 | 768 |
| 2 | Sulabesi Selatan | … | 816 | … | … | … | 330 | 669 |
| 3 | Sanana | … | 390 | … | … | … | 195 | 977 |
| 4 | Sulabesi Tengah | … | 424 | … | … | … | 226 | 844 |
| 5 | Sulabesi Timur | … | 390 | … | … | … | 354 | 880 |
| 6 | Sanana Utara | … | 92 | … | … | … | 51 | 592 |
| 7 | Mangoli Timur | … | 4 292 | … | … | … | 526 | 890 |
| 8 | Mangoli Tengah | … | 4 487 | … | … | … | 521 | 780 |
| 9 | Mangoli Utara Timur | … | 3 340 | … | … | … | 498 | 571 |
| 10 | Mangoli Barat | … | 5 247 | … | … | … | 63 | 650 |
| 11 | Mangoli Utara | … | 5 147 | … | … | … | 47 | 598 |
| 12 | Mangoli Selatan | … | 5 180 | … | … | … | 491 | 563 |
|  | **Kepulauan Sula** | … | **30 596** | … | … | … | **3 564** | **8 782** |

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Kepulauan Sula

Tabel I.4 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di kabupaten Kepulauan Sula (Ton), 2014-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kecamatan**  ***Subdistrict*** | **Perikanan Laut**  ***Marine Fisheries*** | | **Perairan Umum**  ***Inland Water*** | | **Jumlah**  ***Total*** | |
|  |  | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Sulabesi Barat | 452 | 465 | 0 | 0 | 452 | 465 |
| 2 | Sulabesi Selatan | 305 | 312 | 0 | 0 | 305 | 312 |
| 3 | Sanana | 650 | 665 | 0 | 0 | 650 | 665 |
| 4 | Sulabesi Tengah | 465 | 483 | 0 | 0 | 465 | 483 |
| 5 | Sulabesi Timur | 235 | 237 | 0 | 0 | 235 | 237 |
| 6 | Sanana Utara | 5873 | 6233 | 0 | 0 | 5873 | 6233 |
| 7 | Mangoli Timur | 220 | 225 | 0 | 0 | 220 | 225 |
| 8 | Mangoli Tengah | 412 | 416 | 0 | 0 | 412 | 416 |
| 9 | Mangoli Utara Timur | 463 | 466 | 0 | 0 | 463 | 466 |
| 10 | Mangoli Barat | 556 | 563 | 0 | 0 | 556 | 563 |
| 11 | Mangoli Utara | 1112 | 1201 | 0 | 0 | 1112 | 1201 |
| 12 | Mangoli Selatan | 2117 | 2125 | 0 | 0 | 2117 | 2125 |
| **K** | **epulauan Sula** | **12 860** | **13 391** | **0** | **0** | **12 860** | **13 391** |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kepulauan Sula

Tabel I*.*5 Perkembangan produksi hasil perikanan menurut jenis ikan di kabupaten Kepulauan Sula (Ton), 2012-2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Ikan |  | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| *Kind of Fish* |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tuna | 889,3 | 725,4 | 950,1 |
| Cakalang | 338,5 | 268,1 | 356,2 |
| Tenggiri | 42,8 | 37,4 | 44,8 |
| Dasar Campuran | 735,0 | 328,3 | 765,8 |
| Layang | 576,1 | 268,1 | 698,6 |
| Deho | 124,5 | 97,3 | 132,0 |
| Julung-Julung | 364,3 | 295,2 | 387,5 |
| Teri | 113,3 | 85,7 | 120,2 |
| Lobster | 4,2 | 2,1 | 5,3 |
| Hiu | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Cumi-cumi | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Rumput Laut | 0 | 0 | 1,5 |
| Gurita | 7,2 | 1,4 | 1,4 |
| Kembung | 23,48 | 15,2 | 15,8 |
| Terbang | 0 | 0 | 0,5 |
| Udang Putih | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Jumlah  3 220,28 | | 2 126,3 | 3 482 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kepulauan Sula

Tabel I.6 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di kabupaten Kepulauan Sula, 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Klasifikasi Industri**  ***Industrial Classification*** | **Perusahaan**  ***Establishment*** | **Tenaga Kerja**  ***Employee*** |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 10 | Makanan/*Food* | 78 | 289 |
| 11 | Minuman/*Beverage* | 6 | 16 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kepulauan Sula

Pada umumnya masyarakat kabupaten Kepulauan Sula memiliki sumber daya manusia yang masih sangat rendah. Sehimgga pengetahuan dan keterampilan yang dimilikipun masih sangat terbatas. Karena keterbatasan pengetahuan tersebut, maka dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada hanya dalam bentuk pengelolaan untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Sedangkan bagaimana cara untuk mengelola sumber daya alam dengan menggunakan teknologi tepat guna belum dapat terpikirkan. Selain itu, kelembagaan adat yang belum diberdayakan sehingga berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Tabel I.7 Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di kabupaten Kepulauan Sula (juta rupiah), 2012-2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lapangan Usaha**  ***Industry*** | **2012** | **2013** | **2014\*\*** | **2015xx** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 865 634,7 | 471 699,1 | 488 791, 5 | 504 325,3 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 2 346,3 | 1 259,3 | 1 444,7 | 1 621,4 |
| 3. | Industri Pengolahan | 116 768,1 | 105 061,1 | 108 826,4 | 111 358,1 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 800,2 | 588,3 | 764,9 | 861,5 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 874,7 | 859,1 | 902,3 | 927,02 |
| 6. | Konstruksi | 119 047,9 | 109 277,1 | 117 997,2 | 128 994,9 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2 396 232,9 | 168 675,3 | 185 522,3 | 201 111,3 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 30 492,3 | 25 083,0 | 26 922,7 | 30 435,5 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2 463,2 | 2 008,9 | 2 122,6 | 2 251,003 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 21 666,3 | 18 893,1 | 21 420,9 | 23 709,7 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 20 239,7 | 18 010,6 | 19 055,9 | 20 610,8 |
| 12. | Real Estate | 1 284,6 | 988,8 | 1 050,2 | 1 151,4 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 2 008,3 | 1 931,7 | 2 031,1 | 2 228,3 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 227 375,7 | 197 031,4 | 207 696,99 | 224 384,3 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 50 546,8 | 42 745,1 | 46 309,4 | 49 208,7 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 19 146,6 | 15 259,5 | 16 312,9 | 17 360,3 |
| 17. | Jasa lainnya | 6 480,1 | 4 938,7 | 5 252,8 | 5 694,997 |
|  | **Produk Domestik Regional Bruto**  ***Gross Regional Domestic Bruto*** | **1 726 798,4** | **1 184 310,2** | **1 254 983,2** | **1 326 234,5** |

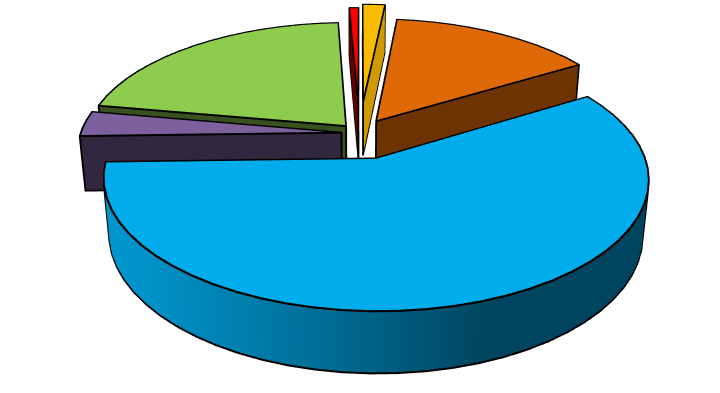
Sumber : BPS kabupaten Kepulauan Sula

Tabel I.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula, 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jenis Kelamin/*Sex*** | |  |
| **Pendidikan Terakhir**  ***Educational Attainment*** | **Laki-Laki**  ***Male*** | **Perempuan**  ***Female*** | **Jumlah**  ***Total*** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sampai dengan SD  *Up to Primary School* | 3 | 0 | 3 |
| SLTP/Sederajat *General/Vocational Junior High School* | 61 | 40 | 101 |
| SMA/Sederajat *General/Vocational Senior High School* | 717 | 623 | 1 340 |
| Diploma I,II  *Diploma I,II* | 139 | 488 | 627 |
| Diploma III/Sarjana Muda  *Diploma III/Bachelor* | 96 | 193 | 289 |
| Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d  *University Graduates* | 567 | 576 | 1 143 |
| **Jumlah/*Total*** | **1 583** | **1 920** | **3 503** |

Sumber/*Source*: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula/ *The Agency of Personnel, Education and Regional Training of Kepulauan Sula Regency*

Gambar 1.2 Distribusi Pencari Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sula, 2014



Sarjana/

Stratum 1 Degree 21%

Sarjana S2/

Master Degree 1%

SD/ Primary

School 2%

SLTP/ Junior

High School 15%

Diploma/

Accademy 3%

SLTA/ Senior

High School 58%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten Kepulauan Sula

Tabel I.9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sula, 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Jenis Kelamin/*Sex*** |  |
| **Status Pekerjaan Utama**  ***Main Employment Status*** | **Laki-laki**  ***Male*** | **Perempuan**  ***Female*** | **Jumlah**  ***Total*** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Berusaha sendiri  *Own account worker* | 5 345 | 1 999 | 7 344 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar *Employer assisted by temporary worker/unpaid worker* | 7 838 | 2 550 | 10 388 |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar  *Employer assisted by permanent worker/paid worker* | 1 130 | 117 | 1 247 |
| Buruh/Karyawan/Pegawai  *Regular employee* | 5 768 | 3 501 | 9 269 |
| Pekerja bebas  *Casual employee* | 1 577 | 159 | 1 736 |
| Pekerja keluarga/tak dibayar  *Family worker/unpaid worker* | 4 435 | 8 071 | 12 506 |
| **Jumlah/*Total*** | **26 093** | **16 397** | **42 490** |

Sumber BPS kabupaten Kepulauan Sula

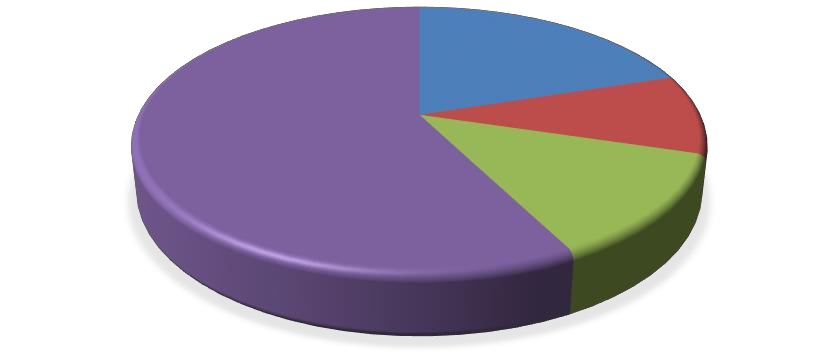
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Penduduk Miskin** |
| ***Number of Poor People*** |
| **Tahun** | **Garis Kemiskinan** |  |
| ***Year*** | ***Poverty Line (*rupiah)** | **Jumlah Persentase** |
|  |  | ***Total Percentage*** |
| (1) | (2) | (3) (4) |
| 2010 | 212 848 | 12 9 |
| 2011 | 232 756 | 14 10 |
| 2012 | 245 626 | 12 9 |
| 2013 | 264 258 | 14 9 |
| 2014 | 275 479 | 13 9 |
| 2015 | … | … … |

Tabel I.10 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di kabupaten Kepulauan Sula, 2010 - 2015

Sumber :BPS kabupaten Kepulauan Sula

Tingkat kemajuan suatu wilayah diukur darti ketersediaan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana, merupakan suatu indicator yang dapat menentukan suatu daerah dapat dikatagorikan sebagai daerah tertinggal. Kabupaten Kepulauan Sula adalah suatu daerah kepulauan, sehingga untuk dapat mengakses suatu daerah dengan daerah lain dalam wilayah perlu memiliki sarana pendukung seperti saran transportasi, komunikasi, serta pelayanan lainnya. Selain itu juga sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan air bersih yang belum tersebar secara merata pada tiap kecamatan, sehingga masyarakat harus menerima konsekuensi ekonomi karena jarak yang jauh antara pemukiman dengan fasilitas yang terdekat. Kesulitan yang dialami seperti inilah yang membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi dan social sebagaimana pada daerah-daerah yang lainnya.

Gambar 1.3 Persentase dan Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisinya di kabupaten Kepulauan Sula, 2015



**Baik / Good;**

**20.01; 20%**

**Sedang /**

**Moderate; 9.66; 10%**

**Rusak Berat/**

**Badly Damaged; 57.51; 57%**

**Rusak Ringan /**

**Damaged; 12.81; 13%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Sula

Permasalahan lain kabupaten Kepulauan Sula disebabkan oleh beberapa kebijakan pembangunan yang beluim tepat. Ini dikarenakan system dan paradigm yang melandasi pelaksanaan pembangunan daerah belum menempatkan karakteristik wilayah dan kebutuhanm masyarakat sebagai dasar pelaksanaan, sehingga kurang tepat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Tabel I. 11 Realisasi Pendapatan Pemerintah kabupaten Kepulauan Sula Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2012 - 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pendapatan**  ***Source of Revenues*** | | **2012** | **2013** | **2014** | **2015 1** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **1.** | **Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Original Local Government Revenue*** | **40 000 000** | **19 029 523** | **12 126 426** | **25 386 947,01** |
| 1.1 | Pajak Daerah/ *Local*  *Taxes* | 1 875 000 | 4 481 893 | 2 723 969 | 4 939 847,13 |
| 1.2 | Retribusi Daerah/  *Retributions* | 28 830 000 | 1 197 034 | 2 306 484 | 4 095 000,00 |
| 1.3 | Hasil Perusahaan Milik  Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Gov, Corporate and Management of Separated Reg, Gov, Wealth* | 400 000 | 0 | 761 392 | 800 000,00 |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang  Sah/*Other Original Local Gov, Revenue* | 8 895 000 | 13 350 596 | 6 334 581 | 15 552 099,88 |
| **2.** | **Dana Perimbangan/**  ***Balanced Budget*** | **478 809 920** | **515 823 977** | **442 954 166** | **663 622 946,00** |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak/*Tax*  *Sharing* |  |  | 8 081 920 | 14 652 117,00 |
| 2.2 | Bagi Hasil Bukan  Pajak/Sumber Daya Alam/*Non Tax/Natural Resources Sharing* | 78 929 070 | 39 516 026 | 22 155 558 | 24 673 199,00 |
| 2.3 | Dana Alokasi Umum  *General Allocation Funds* | 361 491 540 | 408 687 131 | 336 980 078 | 409 259 640,00 |
| 2.4 | Dana Alokasi Khusus  *Special Allocation Funds* | 38 389 310 | 67 620 820 | 75 736 610 | 215 037 990,00 |
| **3** | **Lain-lain Pendapatan**  **yang Sah/*Other Legal Revenue*** | **63 852 448** | **23 229 861** | **44 176 229** | **61 474 391,45** |
| 3.1 | Pendapatan  Hibah/*Grants* | … | … | 0 | 0 |
| 3.2 | Dana  Darurat/*Emergency Funds* | … | … | 0 | 0 |
| 3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak  dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/*tax sharing from province and other local*  *governments* | … | … | 40 151 585 | 5 364 33  1,45 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah O*utonomous Region and Balancing Funds* | … | … | 0 | 22 223 945,00 |
| 3.5 | Bantuan Keuangan dari  Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/*financial assistance from province and other local government* | … | … | 0 | 0 |
| 3.6 | Lainnya/*Other Funds* |  |  | 0 | 0 |
|  | **Jumlah/*Total*** | **582 662 368** | **558 083 361** | **499 256 821,48** | **750 484 284,46** |

Sumber : BPS kabupaten Kepulauan Sula

Tabel I.12 Realisasi Belanja Pemerintah kabupaten Kepulauan Sula Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2014-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jenis Belanja**  ***Kind of Expenditures*** | **2014** | **2015 1** |
|  | (1) | (4) | (5) |
| **1.** | **Belanja Tidak Langsung**  ***Indirect Expenditure*** | **184 595 381,60** | **270 010 086,04** |
| 1.1 | Belanja Pegawai/ *Personnel expenditure* | 173 727 155,20 | 212 922 707,84 |
| 1.2 | Belanja Bunga/ *Retributions* | 0 | 0 |
| 1.3 | Belanja Subsidi  *Subsidies Expenditure* | 2 506 541,00 | 0 |
| 1.4 | Belanja Hibah/*Grant* | 250 000,00 | 23 875 000,00 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial  *Social Expenditure* | 3 883 625,00 | 377 893,20 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota *Sharing Fund Expenditure to*  *Provincial/District/City and Village Government* | 0 | 0 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa  *Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/City and Village Government* | 3 828 160,4 | 30 434 485,00 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga  *Unpredicted Expenditure* | 399 900,00 | 2 400 000,00 |
| **2.** | **Belanja Langsung D*irect Expenditure*** | **255 881 633,14** | **414 605 526 647** |
| 2.1 | Belanja Pegawai/  *Personnel expenditure* | 28 636 760,50 | 33 448 224 400 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa  *Goods and Services Expenditure* | 108 254 837,08 | 152 437 392 109 |
| 2.3 | Belanja Modal  *Capital expenditure* | 118 990 035,56 | 228 719 910 138 |
|  | **Jumlah/*Total*** | **440 477 014,74** | **786 777 247,03** |

Sumber : BPS kabupaten Kepulauan Sula

* 1. **Identifikasi Masalah**

Entitas yang akan dipelajari dalam penelitian ini adalah Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah.. Pengambangan Produk Unggulan Daerah, yang memuat industri-industri yang menjadi unggulan setiap daerah, baik yang menggunakan sumberdaya yang terbarukan maupun sumberdaya tidak terbarukan.

Obyek penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah di kabupaten Kepulauan Sula. Kepulauan Sula merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Maluku Utara.

Pendekatan metoda ini digunakan untuk mengukur kriteria/ indikator Ketersediaan & Kontinuitas Bahan, Dukungan Sumberdaya Manusia, Aspek Pemasaran, Nilai Tambah Ekonomi, Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah, Nilai Tambah Sosial, Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat, Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha, dan Prestise Daerah.

Pendekatan ini digunakan agar penilaian lebih efektif, sehingga kompetensi inti industri daerah benar-benar sesuai.

Atas dasar itulah maka pertanyaan penelitian ini *(Research Question)* adalah:

1. Bagaimana melakukan asesmen Produk Unggulan Daerahdi kabupaten Kepulauan Sula agar mencapai tujuannya?
2. Apakah yang menjadi penentuan kriteria-kriteria Produk Unggulan Daerah kabupaten Kepualauan Sula?
3. Bagaimana strategi implementasi Produk Unggulan Daerah?
   1. **Tujuan Pemecahan Masalah**

Tujuan penelitian pengembangan kompetensi inti industri di daerah adalah :

1. Melakukan asesmen Produk Unggulan Daerah di kabupaten Kepualauan Sula.
2. Menentukan kriteria-kriteria Produk Unggulan Daerah kabupaten Kepualauan Sula.
3. Melakukan strategi implementasi Produk Unggulan Daerah.
   1. **Pembatasan Masalah**

Penilitian ini dilakukan dengan menggunakan perancangan rekayasa sistem (*System engineering*) dan melalui studi kasus dengan batasan masalah sebagai berikut :

1. Obyek penelitian adalah wilayah kabupaten Kepulauan Sula provinsi Maluku Utara.
2. Fokus pembahasan penelitian ini adalah mengenai penentuan Produk Unggulan Daerah kabupaten Kepulauan Sula dan strategi implementasinya.
3. Data dokumen yang diambil adalah data yang paling *update* ketika dilaksanakan penelitian berdasarkan data dokumen yang ada di kabupaten Kepualauan Sula dan provinsi Maluku Utara.
4. Perhitungan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2010, IBM SPSS Statistics 20, dan MATLAB 7.8.0.
   1. **Asumsi-Asumsi**
5. Data yang didapat dianggap memadai dan benar, sehingga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi atau analisis lebih lanjut.
6. Tidak ada kendala-kendala yang berarti, yang akan mengakibatkan kesalahan dalam pengolahan dan pembahasan.
7. Kondisi dan situasi dianggap normal (tidak terjadi perubahan-perubahan yang drastis).
   1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

**1.7 Sistematika Penelitian**

Bab I menjelaskan Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan permasalahan yang diteliti.

Bab II penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi kebutuhan (requirement) kompetensi inti industry daerah dari beberapa studi literature.. Penjelasan mengenai posisi penelitian dibahas lebih mendalam pada Bab II.

Selanjutnya pada Bab III Metodologi penelitian. Dalam bab ini dilakukan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Pengolahan Data. Dengan metodologi pendekatan Logika Fuzzy dan *Resource-Base View* (RBV) untuk mengidentifikasi dan menilai kriteria-kriteria yang ada. Selanjutnya analisis atas hasil uji pengolahan data dan strategi pengembangan untuk Kompetensi Inti Industri Daerah dilakukan pada Bab V, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran pad Bab VI.